
**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD

Laporan Keuangan tahun 2022 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sedangkan tujuan penyusunan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan yang relevan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- b. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- c. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan .

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 No. 07,Ser E Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang ;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang nomor 59 Tahun 2022 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang nomor 44 tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kota pangkalpinang.
18. Ketentuan-ketentuan hukum lain dan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota Pangkalpinang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPKD
	2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
Bab V	Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPKD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar **Rp. 5,428,354,641,00** yang terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	5,153,488,641,00
2	Belanja Modal	274,866,000,00
	Total	5,428,354,641,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100)$
1	Belanja	5,428,354,641,00	5,210,119,120,00	95,98
	- <i>Belanja Operasi</i>	5,153,488,641,00	4,957,204,620,00	96,19
	- <i>Belanja Modal</i>	274,866,000,00	252,914,500,00	92,01

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2022 sebesar **Rp. 5,210,119,120,00** atau atau sebesar **95,98** persen dari pagu anggaran sebesar **Rp.5,428,354,641,00** dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar **Rp.218,235,521,00** atau sebesar **4,02** persen yang dirinci dalam rekening sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Gaji pokok PNS	1.206.297.973,-	1.196.424.662,-	99,18
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.273.288,-	102.784.587,-	95,82
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	166.156.875,-	162.210.000,-	97,62
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.911.500,-	5.880.000,-	99,47
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.584.250,-	25.420.000,-	99,36
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.134.108,-	69.233.520,-	94,67
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.873.947,-	2.570.208,-	89,43
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.800,-	17.832,-	94,85
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.059.762.800,-	1.058.133.000,-	99,85
10	Belanja Honorarium	50.296.600,-	47.117.800,-	93,68
11	Belanja Barang Pakai Habis	840.888.900,-	780.115.727,-	92,77
12	Belanja Jasa Kantor	1.203.464.200,-	1.133.495.173,-	94,19
13	Belanja iuran jaminan/asuransi	5.710.400,-	0,-	0
14	Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin	169.315.000,-	154.645.764,-	91,34
15	Belanja Perjalanan Dinas	236.800.000,-	219.156.347,-	92,55
16	Belanja Modal Alat Kantor	274.866.000,-	252.914.500,-	92,01
TOTAL		5.428.354.641,-	5.210.119.120,-	95,98

2.2. Hambatan atau Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja tidak terlalu signifikan dikarenakan hanya sisa-sisa belanja yang ada sehingga pencapaian anggaran masih bisa terlaksana dengan optimal.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2021 dan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2022. Dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, mulai dari perencanaan, perumusan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sampai dengan pelaksanaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah melaksanakan proses akuntansi atas pelaksanaan APBD. Dengan sistem akuntansi yang ada ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat menghasilkan laporan keuangan pokok yang meliputi Laporan Realisasi APBD. Berdasarkan laporan yang dihasilkan sistem akuntansi yang diikuti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat dijelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan pokok.

3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Realisasi Belanja

Pada Tahun 2021 realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 4.510.614.238 sedangkan pada tahun 2022 realisasinya sebesar Rp. 5.210.119.120 atau 95,98% dari pagu sebesar Rp. 5.428.354.641 terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Terjadi kenaikan anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai CPNS sebanyak 7 orang.

1) Belanja Operasi

Jumlah realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 4.957.204.620,00** atau mencapai **96,19%** dari anggaran belanja operasi sebesar **Rp 5.153.488.641,00**, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp. 5.153.488.641,00	Rp. 4.957.204.620,00	96,19	Rp. 4.392.549.238,00
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 2.697.310.141,00	Rp. 2.669.791.609,00	98,98	Rp. 2.245.274.055,00
5.1.2	Belanja Barang dan jasa	Rp. 2.456.178.500,00	Rp. 2.287.413.011,00	93,13	Rp. 2.147.275.183,00

1.1) Belanja Pegawai

Jumlah realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 2.669.791.609,00** atau mencapai **98,98%** dari anggaran belanja pegawai sebesar **Rp. 2.697.310.141,00**, sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar **Rp. 2.245.274.055,00**.

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Jumlah realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 2.287.413.011,00** atau mencapai **93,13 %** dari anggaran belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 2.456.178.500,00**. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar **Rp. 2.147.275.183,00**.

2) Belanja Modal

Jumlah realisasi belanja modal periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 252.914.500,00** atau **92,01%** dari anggaran belanja modal sebesar **Rp 274.866.000,00**. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar **Rp. 118.065.000,00**.

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5.2.	BELANJA MODAL	Rp. 274.866.000	Rp.252.914.500	92,01	Rp. 118.065.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 274.866.000	Rp.252.914.500,00	92,01	Rp. 118.065.000

2.1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2022 realisasi Belanja modal peralatan dan mesin sebesar **Rp.252.914.500,00** atau **92,01%** dari anggaran sebesar **Rp. 274.866.000,00**. Sedangkan realisasi pada tahun 2021 sebesar **Rp. 118.065.000,00**.

3.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Pos-pos pada Laporan Operasional (LO) terdiri dari :

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
8	BEBAN	5.589.031.952,36	5.181.185.640,86	407.846.311,50	7,87
8.1.01	Beban Pegawai – LO	2.664.776.609,-	2.242.835.377,-	421.941.232,-	18,81
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.524.044.472,-	2.434.134.062,-	89.910.410,-	3,69
8.1.08	Beban Penyusutan dan amortisasi	400.210.871,36,-	504.216.201,86,-	(104.005.330,50)	(20,63)
	SURPLUS/DEFISIT – LO	(5.336.585.677,36)	(4.870.398.240,86)	(466.187.436,50)	9,57

3.2.1 Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO tahun 2021 sebesar Rp. 2.242.835.377,00 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 421.941.232,00 atau 18,81%, sehingga Beban Pegawai–LO tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 2.664.776.609,00. Beban Pegawai – LO 2022 berbeda dengan realisasi dari belanja pegawai tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan atribusi pada beban honorarium pengadaan barang jasa.

3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2021 sebesar **Rp. 2.434.134.062,00**. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 89.910.410,00 atau 3,69%, sehingga beban barang dan jasa pada tahun 2022 menjadi **Rp. 2.524.044.472,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- Beban bahan-isi tabung pemadam kebakaran	Rp.	1.920.000,00
- Beban alat tulis kantor	Rp.	574.217.512,00
- Beban bahan cetak	Rp.	393.442.171,00
- Beban benda pos	Rp.	6.200.000,00
- Beban perabot kantor	Rp.	7.680.815,00
- Beban alat listrik	Rp.	10.963.000,00
- Beban bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp.	3.600.000,00
- Beban bahan-bahan lainnya	Rp.	6.475.000,00
- Beban makanan dan minuman rapat	Rp.	5.890.500,00

- Beban makanan dan minuman aktivitas lapangan	Rp.	6.750.000,00
- Beban jasa tenaga pelayanan umum	Rp.	941.600.000,00
- Beban jasa tenaga kebersihan	Rp.	21.100.000,00
- Beban jasa tenaga keamanan	Rp.	21.100.000,00
- Beban jasa tenaga supir	Rp.	21.260.000,00
- Beban jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	Rp.	10.861.000,00
- Beban tagihan telepon	Rp.	7.125,00
- Beban tagihan listrik	Rp.	80.316.845,00
- Beban kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	Rp.	17.829.893,00
- Beban pembayaran pajak, bea dan perizinan	Rp.	2.245.500,00
- Beban lembur	Rp.	18.160.000,00
- Beban pemeliharaan alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan	Rp.	67.942.165,00
- Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor lainnya	Rp.	15.789.099,00
- Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-alat pembersih	Rp.	6.500.000,00
- Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat pendingin	Rp.	17.000.000,00
- Beban pemeliharaan komputer-komputer unit- personal computer	Rp.	18.000.000,00
- Beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan personal computer	Rp.	8.850.000,00
- Beban pemeliharaan komputer-peralatan komputer- peralatan personal computer	Rp.	19.187.500,00
- Beban perjalanan dinas biasa	Rp.	199.886.347,00
- Beban perjalanan dinas dalam kota	Rp.	19.270.000,00
JUMLAH	Rp.	2.524.044.472,00

3.2.3 Beban Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

Beban Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 504.216.201,86, sedangkan Beban Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 yang merupakan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 400.210.871,36**, dengan rincian sebagai berikut :

- Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Rp. 334.920.375,36
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	Rp. 61.049.040,00
- Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	Rp. 4.241.456,00
- Beban amortisasi aset tidak berwujud	Rp. 0

JUMLAH **Rp. 400.210.871,36**

Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp. (104.005.330,50) atau (20,63%)

3.2.4 SURPLUS/ DEFISIT-LO

Surplus/ Defisit LO pada Laporan Operasional tahun 2021 sama dengan nilai Surplus/ Defisit LO pada LPE tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. (4.870.398.240,86).**

Surplus/ Defisit LO pada Laporan Operasional tahun 2022 sama dengan nilai Surplus/ Defisit LO LPE tahun 2022 pada yaitu sebesar **Rp. (5.336.585.677,36).**

3.3. Penjelasan Terhadap Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari :

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	3.712.110.139,15	1.685.420.509,01
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.336.585.677,36)	(4.870.398.240,86)
RK PPKD	5.210.119.120,00	4.510.614.238,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	2.386.473.633,00
Lain-Lain	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.585.643.581,79	3.712.110.139,15

3.3.1 Ekuitas awal pada LPE tahun 2022 sama dengan nilai Ekuitas Akhir pada Neraca Akhir 2021 atau sama dengan nilai Ekuitas Akhir pada LPE tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. 3.712.110.139,15.**

3.3.2 Surplus/ Defisit LO pada LPE tahun 2021 sama dengan nilai Surplus/ Defisit LO pada Laporan Operasional tahun 2021 yaitu sebesar **Rp. (4.870.398.240,86).** Surplus/ Defisit LO pada LPE tahun 2022 sama dengan nilai Surplus/ Defisit LO pada Laporan Operasional tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. (5.336.585.677,36).**

3.3.3 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada LPE tahun 2021 sebesar **Rp. 4.510.614.238,00**. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada LPE tahun 2022 sebesar **Rp 5.210.119.120,00**

3.3.4 Koreksi Ekuitas tahun 2021 sebesar **2.386.473.633,00**, sedangkan koreksi Ekuitas tahun 2022 sebesar **Rp 0,00**

3.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

A. ASET

1) ASET LANCAR

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp -	Rp -
Investasi jangka pendek	Rp -	Rp -
Piutang Pajak	Rp -	Rp -
Piutang Retribusi	Rp -	Rp -
Piutang Lain-lain	Rp -	Rp -
Persediaan	Rp 332.184.004,00	Rp 317.806.000,00
Jumlah	Rp 332.184.004,00	Rp 317.806.000,00

Penjelasan akun diatas:

3.4.1 Persediaan

3.4.1.1 Persediaan Cetak

Persediaan berupa belanja cetak per 31 Desember 2021 senilai Rp. 187.378.000,00 dan pada tahun 2022 bertambah sebesar Rp. 411.418.775,00 sehingga menjadi Rp. 598.796.775,00. Persediaan cetak yang telah dikeluarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 386.335.771,00 sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 212.461.004,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Uraian	Saldo (Rp)
1	Blangko/Formulir Umum	6.500 lbr	31.200.000,00
2	Blangko/Formulir Umum	800 lbr	3.960.000,00
3	Blangko/Formulir Umum	25850 lbr	129.250.000,00
4	Buku Register Umum	40 buku	1.800.000,00
5	Buku Register Umum	5 buku	240.000,00
6	Buku Register Umum	218 buku	10.889.100,00
7	Buku Register Umum	677 buku	33.850.000,00
8	Blangko E-KTP	100 keping	1.018.200,00

9	Blangko E-KTP	24 keping	253.704,00
	JUMLAH		212.461.004,00

3.4.1.2 Bahan Komputer

Pada tahun 2021 saldo persediaan bahan komputer senilai Rp. 130.428.000,00, pada tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp. 499.638.660,00, sehingga persediaan menjadi Rp. 630.066.660,00. Kemudian persediaan yang dikeluarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 510.343.660,00, sehingga per 31 Desember 2022 terdapat persediaan bahan komputer senilai **Rp. 119.723.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Saldo (Rp)
1	Cleaning kit evolis	5 buah	2.891.000,00
2	Cleaning kit evolis	2 buah	1.736.000,00
3	Cleaning kit zebra	5 buah	5.193.000,00
4	Transfer film evolis	10 buah	9.120.000,00
5	Ribbon evolis	8 buah	29.120.000,00
6	Ribbon evolis	8 buah	36.416.000,00
7	Ribbon zebra	5 buah	5.475.000,00
8	Ribbon zebra	20 buah	29.772.000,00
	JUMLAH		119.723.000,00

2) ASET TETAP

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00
Peralatan dan Mesin	Rp 4.312.047.103,01	Rp 4.051.695.603,01
Gedung dan Bangunan	Rp 3.232.354.811,13	Rp 3.232.354.811,13
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 105.516.238,96	Rp 105.516.238,96
Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 0,00	Rp 0,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (4.403.105.372,25)	Rp (4.002.894.500,89)
Jumlah Aset Tetap	Rp 3.246.812.780,85	Rp 3.386.672.152,21

Penjelasan aset tetap :

1. Tanah

Saldo aset tanah per 31 Desember 2021 senilai **Rp. 0,00** dan pada tahun 2022 tidak mengalami perubahan, sehingga aset tanah per 31 Desember 2022 tetap menjadi senilai **Rp. 0,00**.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp. 4.051.695.603,01 dan mengalami penambahan karena adanya mutasi masuk sp2d sejumlah Rp. 260.351.500,00, dengan rincian aset sebagai berikut :

- Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021	Rp. 4.051.695.603,01
- Mutasi tambah sp2d Pengadaan Alat Komputer	Rp. 260.351.500,00
Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022	Rp. 4.312.047.103,01

3. Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp. **3.232.354.811,13** dan pada tahun 2022 tidak mengalami penambahan sehingga saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 tetap senilai **Rp. 3.232.354.811,13**.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 105.516.238,96, dan pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan sehingga saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 tetap senilai **Rp. 105.516.238,96**.

5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan aset tetap per 1 Januari 2022 sebesar (Rp. 4.002.894.500,89). Pada semester 1 dan 2 tahun 2022 terdapat penyusutan senilai (Rp.400.210.871,00), sehingga saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 menjadi senilai (Rp.4.403.105.372,25) yang terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 3.914.038.581,25
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 467.349.619,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 21.717.172,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Rp. 4.403.105.372,25

3)

ASET LAINNYA

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Jangka Panjang	Rp -	Rp -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -
Aset Tidak Berwujud	Rp 156.820.849,85	Rp 156.820.849,85
Aset Lain-Lain	Rp 13.976.000,00	Rp 13.976.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp (156.386.399,88)	Rp(155.951.949,91)
Akumulasi Penyusutan aset lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lainnya	Rp 14.410.449,97	Rp 14.844.899,94

1. Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp. 156.820.849,85 dan tidak mengalami perubahan, sehingga Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 tetap senilai **Rp. 156.820.849,85**.

2. Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp. 13.976.000,00 dan tidak mengalami perubahan, sehingga Aset lain-lain per 31 Desember 2022 tetap senilai **Rp. 13.976.000,00**.

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp. (155.951.949,91), kemudian pada tahun 2022 akumulasi amortisasi aset tidak berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp (434.449,97), sehingga saldo akhir Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 senilai **(Rp. 156.386.399,88)**.

B. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

KEWAJIBAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp -	Rp -
Utang Bunga	Rp -	Rp -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp -	Rp -
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp -	Rp -
Utang Belanja	Rp 8.198.103,00	Rp 7.212.913,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp -	Rp -

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 8.198.103,00	Rp 7.212.913,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	Rp -	Rp -
Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 8.198.103,00	Rp 7.212.913,00

Pada tahun 2021 terdapat utang beban sebesar **Rp. 7.212.913,00** terdiri dari :

- Beban jasa telepon bulan Desember tahun 2021 Rp. 954.475,00
- Beban jasa listrik bulan Desember tahun 2021 Rp. 6.258.438,00
- Jumlah Utang Beban tahun 2021 Rp. 7.212.913,00**

Pada tahun 2022 terdapat utang beban sebesar **Rp. 8.198.103,00** terdiri dari :

- Beban jasa telepon bulan Desember tahun 2022 Rp. 961.600,00
- Beban jasa listrik bulan Desember tahun 2022 Rp. 7.236.503,00
- Jumlah Utang Beban tahun 2022 Rp. 8.198.103,00**

C. EKUITAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS	Rp. 3.585.209.131,82	Rp. 3.712.110.139,15

Ekuitas Merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pada Akhir Tahun 2021 Ekuitas sebesar **Rp. 3.712.110.139,15** dan pada Akhir Tahun 2022 Ekuitas sebesar **Rp. 3.585.209.131,82**.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. Penjelasan Terhadap Contrapos

Terdapat pengembalian uang ke kas daerah atau contrapos Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.448.819, yaitu :

- | | |
|--|------------------|
| - Pengembalian sisa ganti uang persediaan (GU NIHIL) | Rp. 9.380.071,00 |
| - Pengembalian contra pos | Rp. 1.068.748,00 |

JUMLAH	Rp. 10.448.819,00
---------------	--------------------------

4.2. Penjelasan Terhadap Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan

Pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas yang susunannya telah mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, diharapkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 sebagai Laporan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022 dapat dipahami secara keseluruhan dengan benar oleh para pengguna laporan yang berkepentingan dan mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai penutup dapat dirangkum beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, namun disana sini masih banyak kekurangan yang harus dibenarkan dan dimohon kepada yang berkepentingan harap maklum.
- b. Nilai persediaan dalam neraca sebesar Rp. 332.184.004,00.
- c. Nilai akumulasi penyusutan sebesar (Rp. 4.403.105.372,25).
- d. Nilai aset tetap dalam neraca sebesar Rp. 3.246.812.780,85.
- e. Nilai aset lainnya dalam neraca sebesar Rp. 14.410.449,97.
- f. Jumlah aset Rp. 3.593.407.234,82.
- g. Nilai kewajiban sebesar Rp. 8.198.103,00.
- h. Nilai ekuitas Rp. 3.585.209.131,82.
- i. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 3.593.407.234,82.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan. Selanjutnya laporan keuangan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

